



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
SUB UNIT KERJA : PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, PENGELOLAAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABDUL GHOFFAR**
2. Jabatan : **PENELITI MUDA**
3. NHK : **137500**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.891.300.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/150 m2 di KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 700.000
2. Tanah Seluas 126 m2 di KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 600.000
3. Tanah Seluas 115 m2 di GRESIK, WARISAN Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 3978 m2 di GRESIK, WARISAN Rp. 1.000.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di BOGOR, LAINNYA Rp. 100.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/21 m2 di TANGERANG, LAINNYA Rp. 40.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 35 m2/35 m2 di KOTA JAKARTA UTARA , LAINNYA Rp. 200.000.000
8. Tanah Seluas 4200 m2 di BANDUNG BARAT, LAINNYA Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 104.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.001.300.000
III. HUTANG	Rp.	1.150.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	851.300.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Juli 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.